



Mata kuliah:

# **REFORMASI SISTEM KESEHATAN**

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN**

Kode MK	: KUI 6471
Semester	: 3
Koordinator	: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Tahun Akademik	: 2024-2025

## Seri Webinar Hybrid Reformasi Sistem Kesehatan

Diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Sesi	Topik	Jadwal
<b>Modul 1. Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan di Global dan Indonesia.</b>		
1a	Reformasi Sistem Kesehatan: Memahami Konsep Reformasi Kesehatan dengan Menggunakan Perspektif Learning Health System	Senin 8 Des 2025 (09.00-10.40 WIB)
1b	Reformasi Sistem Kesehatan: Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan di Global dan Indonesia	Selasa 9 Des 2025 (08.00-09.40 WIB)
2a	Sejarah reformasi kesehatan di Indonesia sampai diberlakukannya UU Kesehatan 2023	Rabu, 10 Des 2025 (08.00-09.40 WIB)
2b	12 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode: Apakah merupakan reformasi sektor kesehatan secara menyeluruh	Jumat, 12 Des 2025 (13.00-14.40 WIB)
3	Prinsip Equity dalam Reformasi Kesehatan: Perluasan pelayanan dengan menggunakan Cathlab di daerah sulit.	Senin, 15 Des 2025 (13.00-14.40 WIB)
<b>Modul 2. Tools dalam melakukan Transformasi secara Tematik</b>		
4	Transformasi kesehatan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan prioritas (Tematik): Kasus Kematian Ibu	Selasa 16 Des 2025 (08.00-09.25 WIB)
5	Diagnostik Masalah dengan menggunakan Root Cause Analysis.	Selasa 16 Des 2025 (09.25-10.25 WIB)
6	Action dalam melakukan transformasi kesehatan di topik Kematian Ibu.	Rabu, 17 Des 2025 (08.00-09.25 WIB)
7	Berbagai kasus tematik lainnya dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK).	Rabu, 17 Des 2025 (09.25-10.25 WIB)
<b>Modul 3. Transformasi Kesehatan, Pendanaan, dan kebijakan Desentralisasi Kesehatan</b>		
8	Hubungan Sistem Pengelolaan Kesehatan Pusat dengan Daerah dalam konteks UU Kesehatan 2023 dan UU SJSN/UU BPJS	Senin, 22 Des 2025 (08.00-09.00 WIB)
9	Rencana Induk Bidang Kesehatan dan Reformasi Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/kota	Senin, 22 Des 2025 (09.20-10.20 WIB)
<b>Modul 4. Kepemimpinan dalam transformasi Kesehatan</b>		
10	Kepemimpinan dalam Sistem Kesehatan yang melakukan transformasi.	Selasa, 6 Jan 2026 (08.00-09.25 WIB)
11	Pengembangan Kepemimpinan Klinik dalam sistem rujukan berbasis kompetensi (transformasi rujukan).	Rabu, 7 Jan 2026 (09.25-10.25 WIB)



*“The past is a source of  
knowledge, and the future is a  
source of hope*

-Stephen Ambrose

## Pengantar Blok 3:

- **Refresh:**

### **Reformasi Sektor Kesehatan dan Transformasi Kesehatan di Indonesia**

## Definisi yang dikenal luas: *Health Sector Reform*

*Health sector reform is defined as sustained, purposeful change to improve the efficiency, equity and effectiveness of the **health sector**.*

...

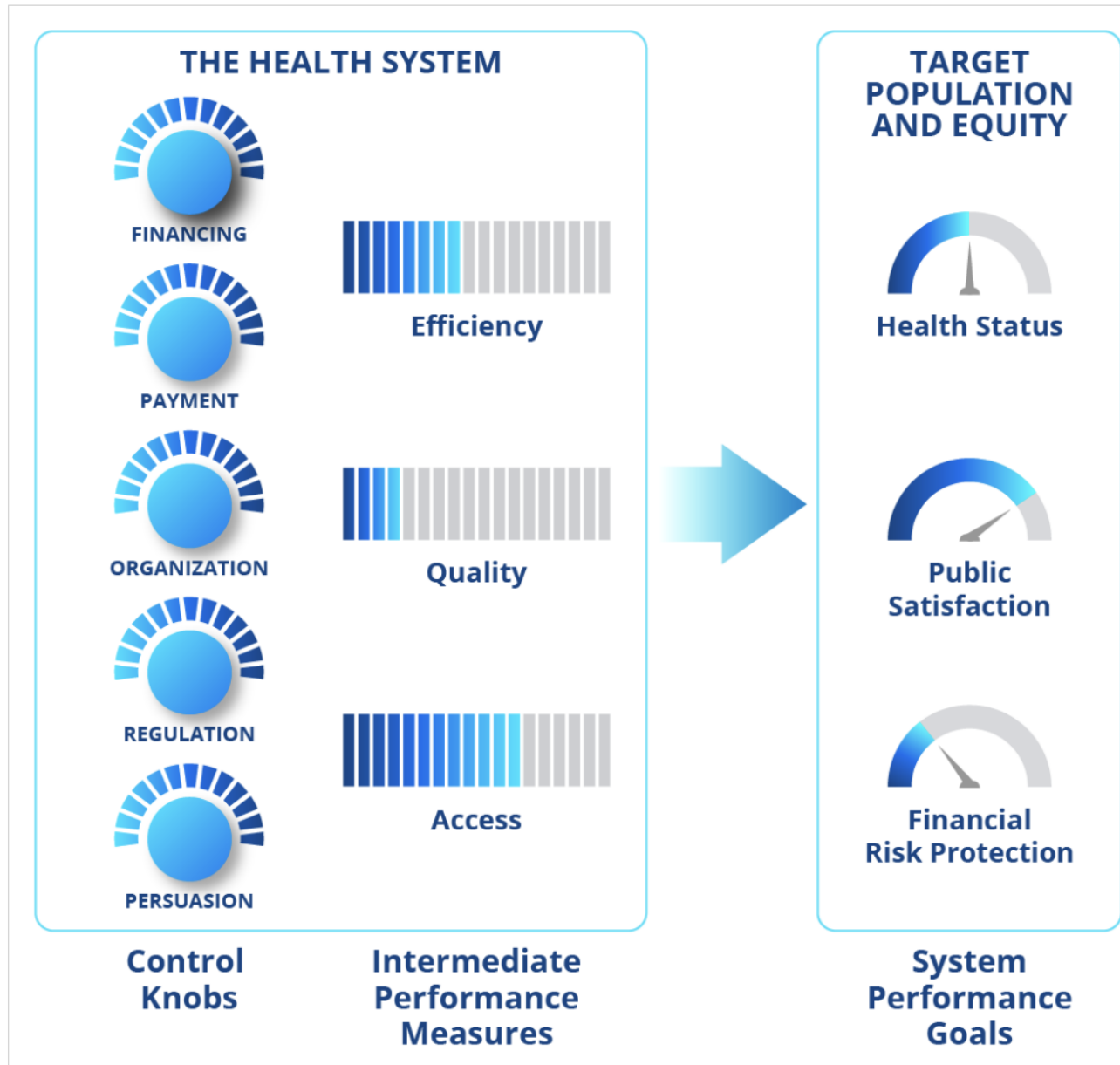
# Catatan:

Tidak semua perubahan kebijakan di kesehatan merupakan reformasi

Figure 3-1: Health system control knobs, intermediate and final performance measures

# Metafora:

The five control knobs for health-sector reform (Roberts et al, 2004, Harvard University)

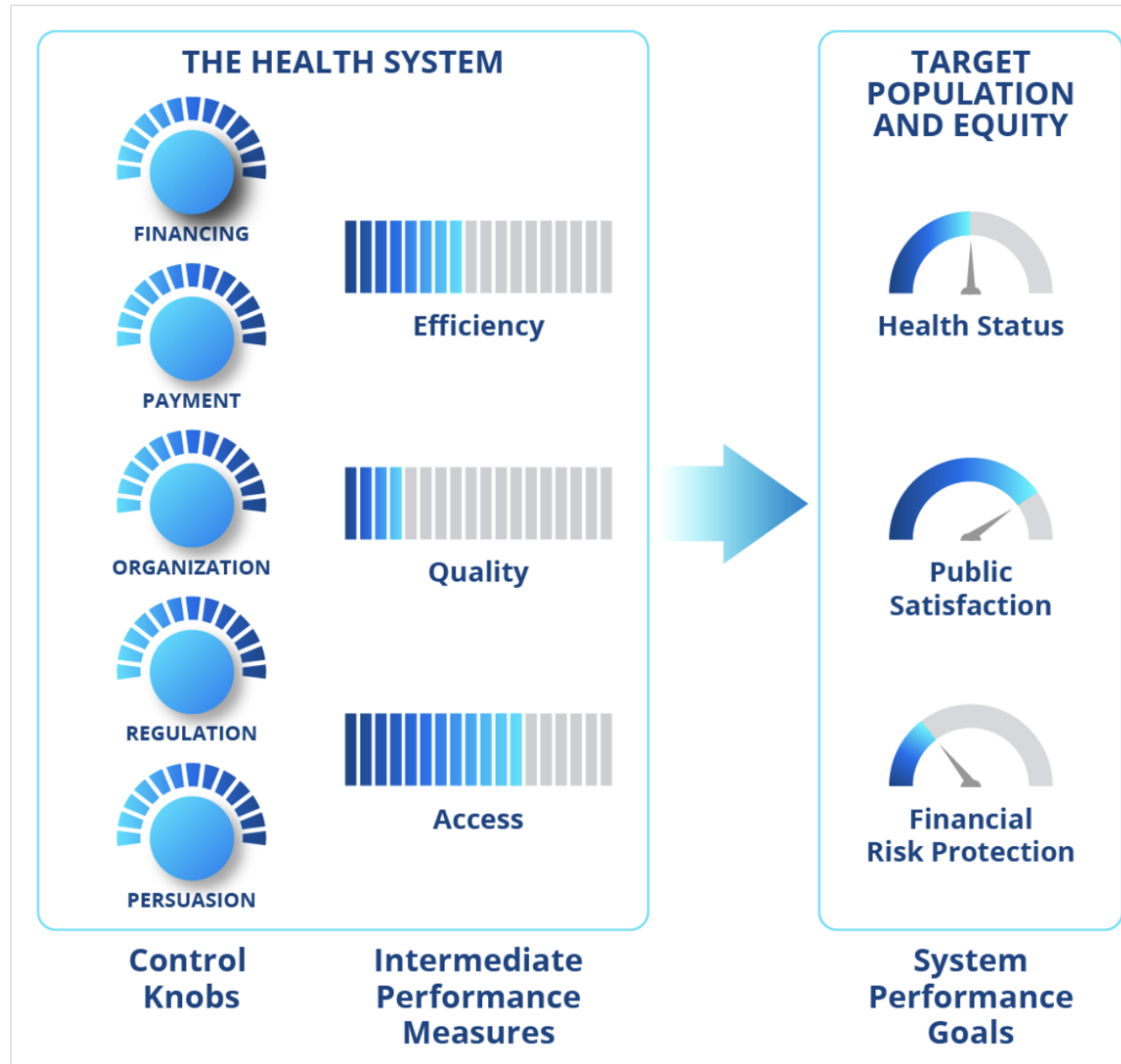


Source: adapted from GHRR, p. 27.

Figure 3-1: Health system control knobs, intermediate and final performance measures

**R besar:**  
semua tombol  
diatur bersama

**r kecil**  
tidak semua  
tombol diatur  
bersama



Source: adapted from GHRR, p. 27.



# Tujuan Reformasi Kesehatan dalam mengatasi masalah bangsa



- Akses dan Cakupan
- Quality dan safety
- membangkitkan sumber-sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan.
- Kepastian hukum



- Status Kesehatan dan Pemerataan
- Responsiveness pelayanan
- Proteksi Katastropik
- Peningkatan efisiensi

Rangkuman dari berbagai sumber

# Langkah-langkah melakukan reformasi kesehatan di sebuah negara

Harvard University,  
2023

*Figure Intro-1: Overview of Eight Practical Steps in the Health Reform Process*



**Situasi awal sector kesehatan di tahun 2000an dengan berbagai UU yang terbit pasca reformasi politik**

# Di awal Reformasi (tahun 2000an)

Ada eforia untuk mengurangi:

- a. otoritas pemerintah pusat dengan kebijakan desentralisasi kesehatan, dan
- b. memecah otoritas Departemen Kesehatan

Ditandai dengan rangkaian UU dalam desentralisasi politik, dan UU Praktik Kedokteran 2004

**+ Kebijakan untuk memperhatikan masyarakat miskin yang terkena imbas krisis moneter di tahun 1990an akhir**

# Kebijakan Pembiayaan - Perlindungan jaminan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin

- ❑ Krisis Ekonomi 1997/1998 menyebabkan tingginya kemiskinan; memicu kesadaran pemerintah untuk perlindungan sosial
- ❑ Pemerintah mengembangkan bertahap sistem jaminan kesehatan sosial, khususnya untuk masyarakat miskin



**“ 76,4 juta masyarakat miskin terlindungi dan meningkatnya kesadaran pemerintah akses kesehatan melalui sistem jaminan sosial”**

# Kebijakan SDM Kesehatan - Pengaturan Praktik Profesi Kedokteran Pasca Reformasi



## Perubahan Kunci : Post-Reformasi

- UU Praktik Kedokteran 2004 mengatur praktik profesi dalam mengatur praktik profesi. UU menggeser otoritas ke organisasi profesi
- Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
- Desentralisasi sistem kesehatan

## Dampak Utama

- IDI memiliki wewenang pembentukan kolegium kedokteran.
- Rekomendasi izin praktik dan pembukaan program studi kedokteran diatur oleh organisasi profesi
- Dominasi organisasi profesi dalam tubuh KKI



## Tantangan

- Pengambilalihan pengaturan praktik oleh IDI; dan Pemerintah dianggap absen dalam menyusun PP dari UU Praktik Kedokteran sebagai aturan pelaksana
- Potensi konflik kepentingan di tubuh KKI dalam pengambilan keputusan
- Euforia Desentralisasi menyebabkan disparitas pemerataan tenaga kesehatan

## Key Insight

Pergeseran Kewenangan Kedokteran :  
Pemerintah → OP (IDI)

Tonggak Perubahan: UU Praktik Kedokteran 2004

Dampak Reformasi pada Sistem Kesehatan Nasional

# Capaian Program Era Reformasi Politik (1999 - 2009)

Banyak mengurangi wewenang pemerintah pusat dan Departemen Kesehatan di sektor kesehatan

	Pasca Reformasi (1998-2009)
Kepemimpinan dan Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 22 Tahun 1999</li><li>2. UU No. 32 Tahun 2004</li><li>3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li><li>4. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN</li><li>5. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li></ol>
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Making Pregnancy Safer (MPS)</li><li>2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas)</li><li>3. Pekan Imunisasi Nasional</li><li>4. Inisiasi Paradigma Sehat</li><li>5. Pencapaian Indonesia Sehat 2010</li><li>6. Kebijakan Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan</li></ol>
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skema pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin melalui program Askeskin yang berubah menjadi Jamkesmas</li><li>2. Pembiayaan JPS-BK, JPK-Gakin, dan Jamkesda sebagai respons terhadap krisis dan untuk meningkatkan cakupan kesehatan masyarakat luas</li></ol>
Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan tenaga kesehatan lokal dan program penempatan dokter serta perawat di daerah terpencil untuk mendukung pemerataan tenaga kesehatan melalui PTT</li></ol>
Produk Obat dan Alat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan pengendalian harga obat generik di sektor publik untuk menjamin ketersediaan obat esensial bagi masyarakat</li><li>2. Program TOGA</li><li>3. Apotek Rakyat</li><li>4. Distribusi Obat Esensial bersubsidi</li></ol>
Sistem Informasi Kesehatan	<b>Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan:</b> Melibatkan pelaporan dan data untuk evaluasi kinerja di sektor kesehatan, mendukung peningkatan pelayanan berbasis data.

	<b>Pasca Reformasi (1998-2009)</b>
<b>Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan tenaga kesehatan lokal dan program penempatan dokter serta perawat di daerah terpencil untuk mendukung pemerataan tenaga kesehatan melalui PTT</li> </ol>
<b>Produk Obat dan Alat Kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pengendalian harga obat generik di sektor publik untuk menjamin ketersediaan obat esensial bagi masyarakat</li> <li>2. Program TOGA</li> <li>3. Apotek Rakyat</li> <li>4. Distribusi Obat Esensial bersubsidi</li> </ol>
<b>Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan:</b> Melibatkan pelaporan dan data untuk evaluasi kinerja di sektor kesehatan, mendukung peningkatan pelayanan berbasis data.



# Tantangan Reformasi Kesehatan di Indonesia:

- 1. Adanya kebijakan pendanaan dengan BPJS sebagai pengelola pendanaan di luar Kemenkes.
- 2. Adanya kebijakan desentralisasi kesehatan

**Menjadi  
Rumit**